

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah defisit anggaran pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan trend yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dimana APBD Kota Gorontalo di tahun 2006 sebesar -12.083 miliar rupiah, untuk tahun 2007 mengalami peningkatan defisit sebesar -112,45 miliar rupiah dan tahun 2008 menunjukkan penurunan defisit sebesar -50,708 miliar rupiah, untuk tahun-tahun selanjutnya sering berfluktuasi.
2. Secara umum jumlah pinjaman daerah Kota Gorontalo cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan terdapat trend peningkatan jumlah pinjaman dari tahun ke tahun.
3. Defisit anggaran Kota Gorontalo memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan pinjaman Kota Gorontalo. Untuk mengetahui dampak defisit anggaran pemerintah daerah terhadap pinjaman daerah, digunakan APBD dari tahun 2008, 2009, 2011, 2012 dan 2013. Dimana setiap peningkatan jumlah defisit anggaran sebesar 1 miliar rupiah akan diikuti dengan peningkatan jumlah pinjaman pemerintah daerah sebesar 0,56 miliar rupiah. Untuk sisanya sebesar 0,44 miliar rupiah, berasal dari SILPA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dana Cadangan dan Penerimaan Piutang.

### 3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya lebih pendapatan, misalnya dengan cara mengintensifikasi pendapatan khususnya untuk pendapatan asli daerah (PAD), lebih banyak mengeluarkan peraturan tentang tata cara pengelolaan PAD, dan mencari titik potensial daerah baik di pusat maupun di dalam dunia bisnis.
2. Jika dilihat dari segi belanja, pemerintah Kota Gorontalo seharusnya lebih mengurangi pengeluaran (belanja), misalnya lebih mengoptimalkan proses pengawasan belanja, lebih memfokuskan belanja untuk tujuan dan sasaran yang jelas bukan untuk tujuan menghabiskan pendapatan, lebih banyak mengupdate standar-standar yang berhubungan dengan biaya.
3. Dalam hal pembiayaan defisit anggaran, seharusnya pemerintah lebih meningkatkan penggunaan dana cadangan, memperbanyak investasi pemerintah yang dapat menghasilkan deviden dan bunga. Mengingat pinjaman daerah sangat beresiko. pinjaman daerah sangat beresiko.

## Daftar Pustaka

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (rangkuman 7 uu, 30 pp dan 15 permendagri)*. Jakarta: Indeks

Halim, Abdul. Dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen

Halim, Abdul. Muhammad, Syam, Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat

Hastin,Mira, dkk. 2013. Analisis Pasar Obligasi Pemerintah di Indonesia. *Jurnl Kajian Ekonomi. Volume 1. No. 2. Hal. 1*

<http://wartaekonomi.co.id/berita6610/bangun-terminal-dungingi-pip-utangi-gorontalo-rp35-miliar.html>. 2012. Diakses, 10 Juni 2013.

<http://civicafm.blogdetik.com/2009/03/06/defisit-anggaran-pemkot-pengaruhi-pembangunan-jalan/>. Diakses, 10 Juni 2013.

<http://www.gorontalokota.go.id>. Diakses, 3 Januari 2014

<http://www.djpk.go.id>. Diakses, 5 Juli 2013

Karismawan, Putu. 2011. Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Pembiayaannya Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ganec Swara. Vol. 5 No.2. Hal. 1*

Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: ANDI

Pamuji, Teguh. 2008. *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia (Tahun 1993-2007)*. Tesis. Semarang. Universitas di Ponegoro

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 *tentang Ringkasan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 22 tentang pembiayaan daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang *tentang pinjaman daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 15 tentang Struktur APBD.*

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Supangat, Andi. 2010. *Statistika (dalam kajian deskriptif, inferensial, dan nonparametrik)*. Bandung. Kencana

Tesamaris, Andiarma. Siti Fatimah. 2005. Analisis Kausalitas antara Hutang Luar Negeri Dengan Defisit Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara Indonesia Tahun 1978-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 6, Nomor 2. Hal. 1
- Waluyo, Joko. 2006. Pengaruh pembiayaan defisit anggaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi: suatu simulasi model ekonomi makro Indonesia 1970 – 2003. *Jurnal Kinerja*: Volume 10, Nomor 1. Hal. 1-22
- Wibisono, Yusuf. 2009. *Metode Statistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Gorontalo: UNG

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN ... : UJI NORMALITAS DATA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

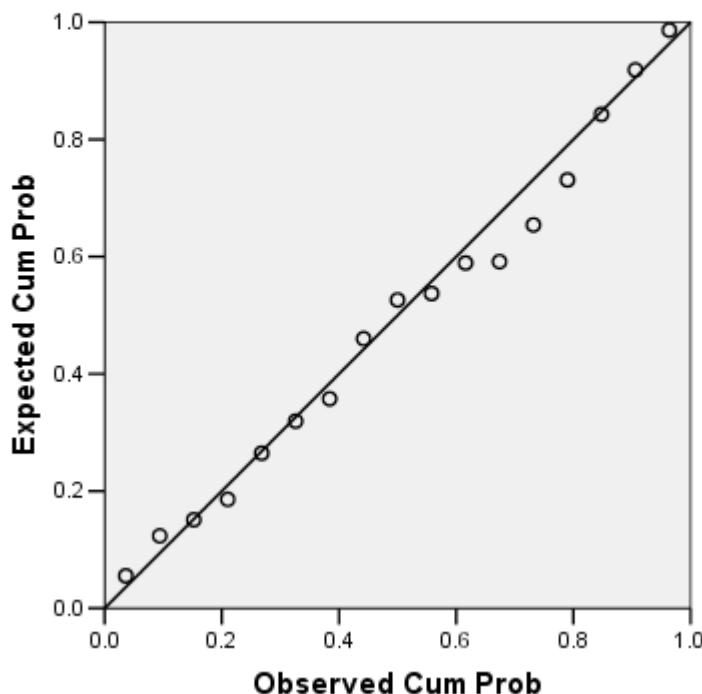
		Pinjaman Pemerintah
N		17
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	7445.3047
	Std. Deviation	3960.44279
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.118
	Negative	-.147
Kolmogorov-Smirnov Z		.605
Asymp. Sig. (2-tailed)		.857

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

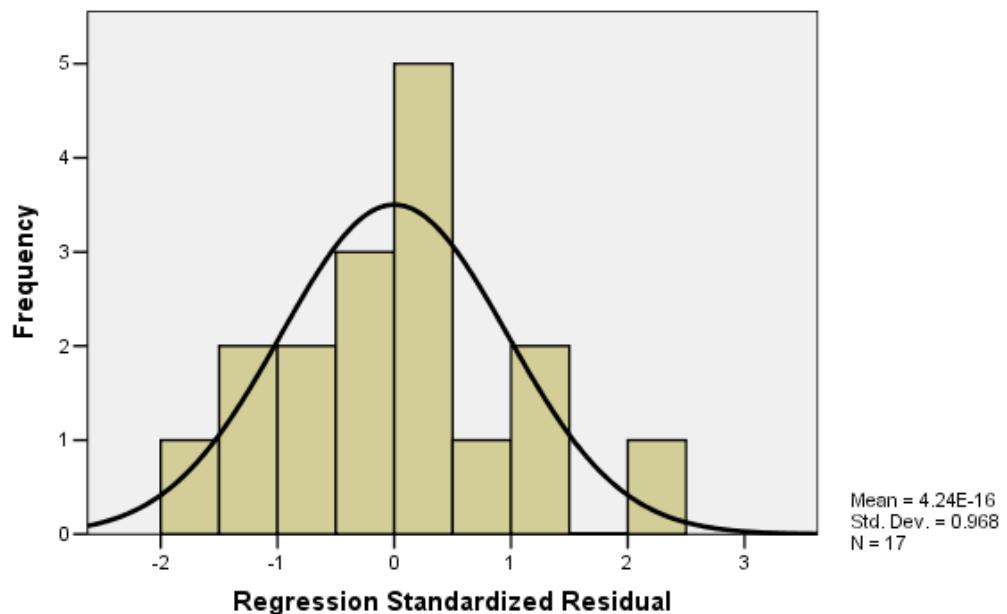
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah



### Histogram

Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah



## LAMPIRAN ... : HASIL ANALISIS REGRESI

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Defisit <sup>a</sup> APBD	.	Enter

- a. All requested variables entered.  
 b. Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 <sup>a</sup>	.329	.284	3350.62447

- a. Predictors: (Constant), Defisit APBD  
 b. Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	82561448	1	82561447.81	7.354	.016 <sup>a</sup>
	Residual	2E+008	15	11226684.35		
	Total	3E+008	16			

- a. Predictors: (Constant), Defisit APBD  
 b. Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	4370.562	1394.974	-.574	3.133	.007
	Defisit APBD	-.560	.206			

- a. Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3998.4492	11460.24	7445.3047	2271.58326	17
Residual	-5342.35	7400.995	.00000	3244.22819	17
Std. Predicted Value	-1.517	1.767	.000	1.000	17
Std. Residual	-1.594	2.209	.000	.968	17

a. Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah